KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : SPBU Swasta kosong,permintaan naik,distribusi masih kurang
Tanggal : Jumat, 19 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

SPBU Swasta Kosong

Permintaan Naik, Distribusi Masih Kurang

SENAYAN menyoroti kekosongan stok sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Kelangkaan BBM swasta ini perlu cepat diatasi.

Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya mendukung Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menambah kuota impor BBM hingga 110 persen dari tahun sebelumnya. Langkah ini dinilai cukup untuk mengakomodasi permintaan pasar dalam kondisi normal.

"Kelangkaan yang sempat terjadi di SPBU Shell dan BP hanya berlangsung di wilayah Jabotabek," sebut Bambang dalam keterangannya, Kamis (18/9/2025)

Diketahui, stok BBM di sejumlah SPBU swasta seperti Shell, AKR, dan BP di kawasan Jabodetabek masih kosong. Bahkan, semua jenis BBM Shell seperti V-Power dan V-Power Nitro sudah kosong sejak tiga hari terakhir. Karena stok BBM kosong, sejumlah karyawan SPBU Shell terpaksa berjualan kopi dan minuman kemasan di pinggir Jalan.

Secara nasional, lanjut Bambang, stok BBM berada dalam kondisi aman karena Pemerintah sudah memberi ruang tambahan melalui kenaikan kuota. Bahkan, produk BBM yang dijual di SPBU swasta juga tersedia lengkap di SPBU Pertamina dengan kualitas yang sama. Masyarakat tidak perlu khawatir soal pasokan maupun mutu bahan bakar.

Menurut Bambang, kekosongan stok di beberapa SPBU swasta disebabkan oleh peningkatan permintaan yang fluktuatif di lapangan. Bukan karena keterbatasan kuota atau lemahnya pasokan nasional. "Kita harus memahami bahwa permintaan bisa melonjak tiba-tiba di daerah tertentu, sehingga distribusi butuh penyesuaian cepat," ujarnya.

Bambang mengimbau Pemerintah mengendalikan volume impor agar tidak berdampak negatif pada stabilitas ekonomi, nilai tukar, dan neraca perdagangan nasional. Solusi yang sudah disiapkan Pemerintah adalah meminta SPBU swasta membeli bahan bakar dasar atau base fuel dari Pertamina. "Base fuel ini adalah bahan bakar dengan kadar oktan murni tanpa campuran aditif," jelasnya.



Bambang Patijaya

Setiap SPBU swasta, kata Bambang, tetap memiliki keleluasaan untuk menambahkan aditif sesuai ciri khas dan standar mutu produk mereka masing-masing. Sehingga, karakteristik dan kualitas yang menjadi keunggulan mereka tetap dipertahankan.

Dengan mekanisme ini, distribusi BBM akan menjadi lebih efisien, stok terjamin, dan koordinasi antara Pemerintah, Pertamina, serta SPBU swasta akan semakin baik. "Pemerintah juga tetap dapat mengendalikan volume impor agar sesuai dengan kebutuhan nasional dan tidak menekan perekonomian," ujar politikus Golkar ini.

Bambang menambahkan, langkah ini menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam mengelola sektor energi dengan pendekatan teknokratik sekaligus kolaboratif. Pemerintah sudah menyiapkan jalur solusi yang seimbang, pasokan terjaga, kepentingan bisnis swasta tetap dilindungi, dan stabilitas ekonomi nasional juga aman.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, kami akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan ini agar berjalan sesuai rencana," tegas legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Bangka Belitung (Babel) ini.

Sementara, Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi meminta Kementerian ESDM berhati-hati menyikapi potensi kelangkaan BBM di SPBU swasta. Stabilitas rantai pasok dan distribusi BBM harus tetap terjaga. "Setiap kebijakan yang diambil Kementerian ESDM harus mempertimbangkan keberlangsungan rantai pasok dan nasib pekerja yang terdampak," ucapnya.

Bambang menyoroti perbedaan jumlah SPBU Pertamina dengan SPBU swasta. Pertamina memiliki 6.400 SPBU dan 6.700 Pertashop. Sedangkan swasta hanya memiliki kurang lebih 450 SPBU. "Jumlahnya sekitar 5 persen (dari jumlah SPBU Pertamina)," sebut dia.

Komisi XII DPR, kata Bambang, ingin setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dilengkapi mitigasi yang matang dan komprehensif untuk menghindari kegaduhan di masyarakat yang akhirnya mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, distribusi BBM untuk SPBU swasta dilakukan melalui kuota yang ditetapkan pemerintah. Bila kebutuhan melebihi kuota, SPBU swasta diminta melakukan kerja sama business to business (B2B) dengan PT Pertamina (Persero). ■ TIF